

## Petani Karawang Melawan Kemiskinan Dalam Kuasa-Politik ; Studi Observasi Partisipatif Tahun 2004-2005

Mulyadi J. Amalik

Universitas Airlangga  
[pule.langpipi@gmail.com](mailto:pule.langpipi@gmail.com)

### Abstract

*Agricultural world was a leading sector in longterm development in the past government (Orde Baru). Agricultural sector was always as a priority in every stages of five years government developmental planning. Unfortunately those regulation concept and theories of the government only putting farmers as an object not as subject in order to develop political images for commercial agencies. Government developmental policy in New Order, which top-down system, induced farmer dependency especially in Karawang district. Therefore, most of them start to build a contrary system to against the policies. This studies using participatory observational, interviews, and intensif dialogue among farmers in Karawang district. Literature data analysis using modernity, developmental, societies and political sociological theories. The reformation era become a first momentum for Karawang's farmers to reorganize and institutionalize their "heiding resistance". After five years of reformation, their organization became participative and independent. Through this organization, farmers capable to create diplomacy, democracy, advocacy, networking and strengthen literacy in order to reorganize their political empowerment.*

**Keywords:** *Karawang's agricultural, New Order, development, modernity, industry*

### Abstrak

Dunia pertanian merupakan sektor unggulan dalam pembangunan jangka panjang pada masa pemerintahan Orde Baru. Sektor pertanian selalu menjadi basis prioritas dalam setiap tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) RI. Namun, konsep dan teori modernisasi yang melandasi pembangunan dunia pertanian itu tidak meletakkan petani sebagai subyek, melainkan dijadikan obyek, baik untuk kepentingan pencitraan politik pemerintah Orde Baru maupun untuk kepentingan komersil aparat terkait. Khusus di Kabupaten Karawang, kebijakan pembangunan pertanian masa Orde Baru yang bersifat top-down menyebabkan ketergantungan petani sekaligus melahirkan pembangkangan atau perlawanan tersembunyi. Riset ini menggunakan metodologi observasi-partisipatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan dialog intensif dengan para petani di Kabupaten Karawang. Analisis data kepustakaan menyangkut sejarah dan isu-isu strategis dunia petani dilakukan dengan landasan teori modernisasi, teori pembangunan, teori masyarakat, dan sosiologi politik. Setengah dekade awal pascareformasi menjadi momentum bagi petani Karawang untuk menata dan melembagakan "perlawanan tersembunyi" mereka menjadi manifes sebagai organisasi petani yang independen dan partisipatif. Melalui organisasi itulah petani melakukan pemberdayaan politik untuk kepentingan kolektif, seperti cara berorganisasi, berdemokrasi, berdiplomasi, advokasi nonlitigasi, menggunakan media massa untuk opini, menata jaringan, dan menguatkan literasi berdasarkan pengalaman

**Kata kunci:** Pertanian Karawang, Orde Baru, Pembangunan, Modernisasi, Industri

### Pendahuluan

Pada masa lalu, intervensi pemerintah Orde Baru sangat kuat dalam pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemerintah menginisiasi pembentukan organisasi petani, koperasi petani, penyeragaman pola tanam atau bibit padi serta pestisida yang mematikan daya kreatif dan kearifan lokal petani. Petani terbiasa menunggu dan meminta kebaikan pemerintah saat dunia pertanian diguncang musibah mewujud menjadi alam kesadaran dan pengetahuan petani. Pemerintah berupaya menanamkan kesadaran mistis pada petani



melalui program-program atau pembangunan pertanian yang berbau karitatif, walaupun sebenarnya bersifat memaksa dan sarat dengan kepentingan politik. Akibatnya, petani memistifikasi pemerintah serupa malaikat kesejahteraan. Ketika kebaikan pemerintah tidak terbukti menyelamatkan petani dalam jangka panjang, petani kehilangan kepercayaan dan melakukan resistensi secara diam-diam. Kronologi historis pertanian di Kabupaten Karawang di bawah ini akan menunjukkan proses dan intensitas terjadinya pergeseran kesadaran dan pengetahuan petani. Ini memperlihatkan tahap perubahan, dinamika dan kompleksitas, serta kejutan-kejutan besar dalam masyarakat petani Karawang.

Pertama, tahun 1966-1970. Pemerintah memberlakukan kebijakan Revolusi Hijau. Menyusul itu, lahirlah program Panca Usaha Tani yang terdiri dari: 1) pemilihan bibit unggul; 2) pengolahan tanah yang baik; 3) penggunaan air irigasi; 4) pemupukan yang berimbang; dan 5) pengendalian hama. Program ini mengharuskan petani menggunakan pestisida secara besar-besaran, namun disubsidi oleh pemerintah. Petani diwajibkan membeli bibit padi dari pemerintah. Bila kedapatan petani menggunakan varietas yang berbeda dari ketentuan pemerintah, tanaman petani tersebut akan dicabuti. Akibatnya, padi varietas lokal lambat-laun menghilang. Dalam situasi seperti ini, petani tidak punya pilihan karena trauma pada musim kelaparan yang telah menimpa mereka pada masa sebelumnya. Tahun 1967, kawasan pertanian di Karawang menjadi ladang racun karena penggunaan pestisida yang berlebihan. Pada tahun itulah Intensifikasi Massal (Inmas) dan Bimbingan Massal (Bimas) mulai dicanangkan.

Tahun 1968, pestisida jenis Agrotion disemprotkan ke kawasan pertanian Karawang dengan menggunakan pesawat terbang sehingga merusak keseimbangan alam. Tidak hanya hama padi yang mati, tetapi juga burung-burung sawah dan semua jenis serangga. Bahkan, banyak pohon tanaman keras tidak bisa berbuah. Menurut para petani Karawang yang mengalami zaman “hujan pestisida” tersebut, hanya makhluk sejenis semut hitam yang bisa bertahan hidup. Pada tahun 1969, ketika terjadi ledakan hama dan penyakit padi yang dijuluki OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), petani mulai terbiasa membeli bibit unggul, pestisida, pupuk buatan pabrik yang ditetapkan pemerintah. Program Panca Usaha Tani pun menunjukkan hasilnya, yaitu kepatuhan petani pada pemerintah. Hingga tahun 1970, petani mulai merasakan peningkatan biaya produksi dalam bertani sebab diarahkan menggunakan alat-alat mesin pertanian. Tenaga kerbau untuk membajak sawah dapat diganti dengan mesin pembajak (traktor). Pemerintah memunculkan padi varietas Pelita I dan II untuk mengganti varietas VB5 yang rentan penyakit, tetapi terjadi lonjakan hama jenis wereng.

Kedua, tahun 1971-1980. Tahun 1973, pemerintah memasyarakatkan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang berfungsi memonopoli pembelian hasil pertanian dan pendistribusian pupuk pabrik, bibit, dan obat (pestisida). Petani harus membeli pupuk dan menjual hasil panen ke BUUD dalam wilayah Karawang. Bila tidak, panen petani akan disita pemerintah. Andai petani tidak membeli pupuk di BUUD, mereka akan ditanggkap. Akan tetapi, bila pupuk tidak diambil, beban kredit dianggap terus berjalan. Pelembagaan proses jual-beli kebutuhan pokok pertanian melalui BUUD ini sesungguhnya dapat meminimalisasi gerakan kaum lintah darat atau pengijon, tetapi kepengurusan lembaga tersebut dipenuhi oleh elite pemerintah. BUUD itu diisi oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan sejumlah birokrat dari instansi pemerintah, selain Kepala Desa dan pejabat Bank Rakyat Indonesia (BRI). Petani tidak punya tempat di lembaga dagang tingkat desa ini. Aspirasi dan hak-hak petani tidak terakomodasi. Petani justru membelot atau membangkang dengan mengutang kepada lintah darat.

Tahun 1975, pemerintah menerapkan Intensifikasi Khusus (Insus) setelah padi varietas Pelita mulai memunculkan OPT baru, yaitu walang sangit dan ulat grayak. Tahun 1977, pemerintah membentuk organisasi petani bernama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang menimbulkan pengelompokan status petani, seperti pemula, madya, dan utama. Keanggotaan KTNA bersifat elitis karena hanya berisi para petani (dan nelayan) yang dianggap unggul/berhasil secara individual. Pada masa inilah cara memanen padi dengan ani-ani (ketam) diganti dengan sabit. Peran perempuan mulai terpinggir akibat pergantian cara panen ini. Sementara itu, penyemprotan hama dari udara dengan pesawat masih diterapkan dan impor beras mulai dilakukan oleh pemerintah. Beras itu didatangkan dari Korea, Jepang, dan Vietnam. Antara 1975-1976, masyarakat petani dilanda ancaman kelaparan karena gagal panen akibat ledakan OPT. Bulgur pun menjadi alternatif pengganti beras.

Pada 1978-1980, tanah lahan pertanian di tiga kecamatan di Kabupaten Karawang, yaitu Kecamatan Pakisjaya, Cilamaya, dan Tempuran kehilangan kesuburan (bera) sehingga tidak dapat ditanami padi. Para petani meninggalkan lahannya tersebut dan bertransmigrasi dengan dana swadaya. Ketika pemerintah memberlakukan Program Nasional Sertifikasi, tanah-tanah bera itu disertifikatkan oleh perangkat desa dan diagunkan ke bank. Terjadilah konflik panjang antara perangkat desa dan petani pemilik lahan yang sudah pulang dari transmigrasi. Mendekati 1980, pemerintah menyelenggarakan proyek pencetakan sawah baru oleh Unit Pelaksanaan Pembentukan Sawah Baru untuk Provinsi Jawa Barat. Proyek ini sukses di Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, tetapi berkonflik di Kecamatan Batu

Jaya dan Kecamatan Cilamaya. Bersama dengan itu pemerintah melakukan sertifikasi tanah, pengolahan tanah, pemeliharaan tanah, pemberian sarana produksi, dan pemberian kredit yang dikembalikan setelah 5 tahun. Sisi lain, rakyat mulai menolak keberadaan BUUD yang tidak efektif dan ada kelonggaran bagi petani untuk menentukan varietas padi yang mau ditanam. Pelonggaran itu diberikan untuk menghindari gejala menjelang pemilihan umum dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketiga, tahun 1981-1990. Tahun 1981, varietas Cisadane dikampanyekan pemerintah dengan opini bahwa varietas tersebut dapat menghasilkan 8 ton gabah per hektar. Menurut pemerintah, hasil tersebut terbukti di Desa Rawagempol, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga lahir slogan versi pemerintah yang berbunyi: "Merawagempolkan Jawa Barat". Slogan ini berfungsi memistifikasi fakta di kalangan petani Karawang untuk memperlancar agenda swasembada pangan. Pemerintah menginstruksi petani agar memakai benih varietas Cisadane dari satu produsen, yaitu perusahaan milik negara (BUMN) P.T. Sang Hyang Sri. Di kalangan petani sesungguhnya sudah muncul varietas tandingan, yaitu varietas Citanduy dan Cimandiri.

Ujung 1981, aparat Golongan Karya melakukan Golkarisasi pada masyarakat Karawang. Tahun 1982, pemerintah memberikan bantuan traktor kepada petani, namun tidak pernah diterima petani. Petani menyebutnya sebagai bantuan simbolis. Dalam hitungan politik, bantuan itu untuk meredam radikalisme petani sebab mendekati pemilihan umum ke-3. Antara 1981-1984, pemerintah mengumbar cerita keberhasilan swasembada pangan ke level internasional sehingga Presiden Soeharto memperoleh penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma, Italia. Tahun 1983-1984, pemerintah menjanjikan dana gratis naik haji bagi petani yang bisa panen sampai 14 ton per hektar. Akibatnya, petani mengidap mental berjudi dengan menghalalkan segala cara. Di kalangan petani mulai muncul perilaku asal bapak senang (ABS) dengan merekayasa hasil pertaniannya. Misalnya, panen padi seluas 2 hektar dikatakan 1 hektar. Padahal, inovasi petani sudah tumbuh dengan menciptakan varietas Jeger dan varietas Delis yang disebut varietas Muncul.

Tahun 1985, terjadi ledakan hama wereng di 17 provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Muncul wabah penyakit tungro dari varietas Cisadane. Pemerintah mengenalkan organisasi Petani Pengguna Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di kalangan petani di Kabupaten Indramayu hingga Kabupaten Karawang. Tahun 1986 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1986 tentang pelarangan 57 jenis insektisida. Inpres ini dikawal oleh Komisi Pestisida (Kompes) yang beranggotakan aparat pemerintah dari instansi terkait dan bertujuan mengawasi petani agar tidak menanam varietas Cisadane. Bila petani melanggar, tanamannya akan dicabuti oleh aparat desa yang melibatkan anak-anak sekolah. Tahun 1987, pemerintah mencanangkan program Supra Insus Jalur Pantura yang berisi 10 paket teknologi, yaitu 1) pengolahan yang baik dan sempurna; 2) benih berlabel biru atau IR64; 3) jarak tanam 22 x 22 cm, 15 x 30 cm, atau 1 hektar sama dengan 200.000 rumpun padi; 4) pemupukan yang berimbang: urea 2 kwintal, TSP 1 kwintal, ZA 1 kwintal, dan KCl 1 kwintal; 5) penggunaan pupuk pelengkap cair (PPC) --jenis PPC = sitosin 50.000/liter-- atau zat perangsang tumbuh (ZPT); 6) pola tanam: padi-padi-palawija; 7) tata guna air di tingkat usaha tani; 8) pengendalian hama terpadu; 9) pergantian varietas; dan 10) penanganan pascapanen: menggunakan power traser untuk perontok padi [di atas lahan seluas 4 x 4 m], menggunakan sabit bergerigi [diberi gratis oleh pemerintah], dan pembentukan kelompok jasa permanen. Pada tahun tersebut harga gabah naik mencapai Rp24.000;/kwintal. Kenaikan itu mendekati pemilihan umum ke-4. Pemerintah Orde Baru juga membagikan semprotan gratis untuk petani, walau sebagian dijual oleh aparat yang bertugas. Ada pula kredit alat-alat mesin pertanian dengan jaminan sertifikat tanah. Traktor pembajak sawah dan pengereng gabah pun banyak digunakan petani, selain mesin penggilingan beras.

Sisi lain, pemerintah terus menggencarkan program Kredit Usaha Tani (KUT), pengadaan pangan, dan pengadaan sarana produksi (pupuk dan pestisida). Pemantauan pada petani terus dijalankan pula secara ketat. Bagi petani yang masih menanam varietas Muncul akan didenda Rp50.000; dan hasil panennya tidak akan dibeli oleh Depot Logistik (Dolog). Ketika itu, hasil panen IR64 tergolong tinggi sehingga menjadi berkah bagi pemegang mandat KUT dan Dolog. Dalam perkembangan berikutnya, harga gabah kembali jatuh menjadi Rp11.000;/kwintal dan petani mulai menolak keberadaan KUT. Akibatnya, kucuran bantuan pemerintah untuk petani melalui KUT hanya dimanfaatkan oleh pengurus KUT sendiri. Hingga 1987, pemerintah mewajibkan petani menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) dan sebelumnya diberi pelatihan tentang koperasi.

Memasuki 1989, pemerintah memperluas varietas IR64 dan kembali mengharuskan petani menanamnya. Namun, Kelompok Tani Sempurna di Kecamatan Cilamaya berani menentang keharusan itu dengan tetap menanam varietas Muncul. Sejak 1989 hingga 1990, terjadi ledakan OPT, yaitu sejenis hama putih penggerek batang padi. Wabah OPT akibat petani menggunakan carbofuran atau pestisida besar-besaran ini tidak hanya menimpa Kabupaten Karawang, tetapi juga Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Cirebon. Di Kabupaten Karawang, tanaman padi petani

mengalami bapuk (menguning dan kemudian mengering sampai mati) sehingga banyak petani yang stres dan wafat mendadak. Pejabat pemerintah tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten berdatangan ke daerah-daerah yang terkena musibah itu sambil membagi-bagikan benih dan obat tanaman secara gratis. Selama tahun 1990 tersebut, pemerintah menggelar pelatihan pengendalian hama terpadu (PHT) di tiap-tiap desa di 5 kabupaten itu selama 14 hari. Pelatihan PHT ini dilembagakan menjadi Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), tetapi kapasitasnya sangat lemah sehingga tidak efektif.

Keempat, tahun 1991-2000. Tahun 1991, saat hama penggerek batang padi masih mewabah, muncul pula ledakan OPT sejenis walang sangit, ulat grayak, wereng, dan hama putih. Petani kehilangan kepercayaan pada ketahanan varietas IR64 terhadap hama dan penyakit. Petani lebih suka menanam varietas Muncul. Untuk menyaingi varietas Muncul, pemerintah menciptakan varietas Membramo. Bagi petani yang menanam varietas Membramo tersebut pemerintah menjanjikan harga jual yang tinggi, walaupun janji tersebut tidak pernah ditepati. Bersamaan, ilmuwan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Philipina datang ke Kabupaten Karawang untuk meneliti ledakan hama penggerek batang padi. Laboratorium Pertanian pun didirikan di Desa Penyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Karawang. Penelitian itu didanai oleh FAO. Dinas Pertanian Karawang sendiri menggratiskan petromak dan kantong plastik kepada petani untuk memunguti gumpalan-gumpalan telur hama penggerek batang padi di sawah. Anak-anak Sekolah Dasar dikerahkan untuk membantu petani. Sementara itu, proyek PHT terus dilaksanakan, walaupun tidak laku di kalangan petani.

Pada 1992, terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman. Petani dibebaskan bercocok tanam. Keluar pula Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pengembangan Pengendalian Hama Terpadu, disusul Instruksi Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pengembangan Pengendalian Hama Terpadu Swadaya. Kelompok Tani Kecamatan Jatisari, Karawang, mendapat penghargaan Supra Insus dari pemerintah pusat pada tahun ini. Tahun 1993, pemerintah melonggarkan kebijakannya tentang pertanian sebab menjelang pemilihan umum dan Sidang Umum MPR. Masa itu, pemerintah menggelar pertemuan taruna tani se-Indonesia di Simalungun, Sumatera Utara. Ada pula pelimpahan tugas pemanduan PHT dari aparat pemerintah kepada petani sehingga berlaku oleh petani untuk petani.

Tahun 1994, pemerintah menekan petani agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tenggang waktu 3 bulan. Bersamaan, Kabupaten Karawang mendapat penghargaan Supra Insus dari pemerintah pusat. Rentang 1996-1997, tanah petani di Desa Tegalsari, Kecamatan Cilamaya, dikapling untuk perumahan oleh perusahaan pengembang. Para petani melawan dengan siasat melakukan "kuningisasi" sehingga menghasilkan rekomendasi dari pemerintah setempat yang berisi larangan membangun perumahan dan industri di atas lahan produktif. Izin prinsip pengembangan kota pun dipersulit. Tanah milik petani yang semula dikapling akhirnya kembali kepada petani.

Dalam tahun 1994 pula petani alumni Sekolah Lapangan PHT dari 6 kelompok tani di Desa Rawa Gempol Wetan, Kecamatan Cilamaya, membentuk organisasi bernama "IKLAS". Organisasi ini fokus melakukan PHT se-Kabupaten Karawang yang diikuti sekitar 1.300 orang petani dan dihadiri Bupati serta Camat se-Kabupaten Karawang. Kegiatan IKLAS ini dihadiri juga oleh anggota Fraksi ABRI dan Fraksi Golkar DPRD Karawang serta utusan dari instansi pemerintah terkait. Namun, petugas penyuluh pertanian tidak mengakui keberadaan organisasi IKLAS dan menuduhnya sebagai Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Pada masa ini, gerakan-gerakan oposisi pro-demokrasi yang dipelopori aktivis mahasiswa, intelektual-kritis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat mulai bangkit di berbagai kota di Indonesia. Pada Juli 1996, pecah kerusuhan politik di Jakarta menyusul konflik internal penuh kekerasan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia akibat intervensi pemerintah Orde Baru. Efeknya, gerakan pro-demokrasi mengalami tiarap nasional dan banyak aktivis oposisi diburu dan ditangkap.

Memasuki 1997, petani mendapat kemudahan dari pemerintah karena akan menjelang pemilihan umum dan Sidang Umum MPR. Pejabat pemerintah provinsi dan para menteri merayakan Hari Krida Pertanian di Pangandaran, Jawa Barat. Bersamaan, terjadi perundingan antara organisasi tani IKLAS dan Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) serta Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Karawang. Perundingan yang dihadiri oleh ketua Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan (PPL) Pusat tersebut tidak memperoleh titik temu karena perbedaan pendapat yang tajam. PPL membuat pernyataan bahwa organisasi tani yang sah di Kabupaten Karawang ialah organisasi bentukan pemerintah, yaitu HKTI dan KTNA. Jauh sebelum ini, para petani sudah antusias menerima organisasi tani IKLAS sehingga mulai berkembang di tingkat kecamatan di Karawang.

Saat pemilihan umum 1997, Golkar sebagai partai berkuasa diduga melakukan banyak kecurangan sehingga memperoleh suara tidak masuk akal: hampir 100% secara nasional. Dugaan kecurangan itu mengundang perhatian para akademisi dan pengamat politik internasional. Dunia internasional melihatnya sebagai gejala kediktatoran yang mengancam negara-negara maju dalam berinvestasi di Indonesia. Mei

1998 merupakan penanda keberhasilan gerakan kaum oposisi dan pro-demokrasi. Tumbalnya cukup mahal sebab ditandai oleh banyaknya aktivis pro-demokrasi yang diculik, ditangkap, atau dibunuh. Selain mengalami kerusuhan yang melanda sebagian besar wilayah Nusantara, Indonesia mengalami puncak krisis ekonomi hingga nilai tukar rupiah berkisar antara Rp10 ribu-Rp11 ribu per dollar AS. Hingga Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie, rupiah berada di posisi Rp12/dollar dan melambung ke Rp16 ribu/ dollar.

Di Karawang, petani mengundurkan musim tanam karena kemarau panjang. Hama wereng coklat meledak sehingga lahan-lahan pertanian Golongan Air I gagal panen dan lahan-lahan pertanian Golongan Air 4 retak-retak. Presiden Habibie berkunjung ke Desa Layapan, Kecamatan Tempuran, Karawang, dan menjanjikan akan menaikkan harga gabah serta menyubsidi pupuk KCl yang akan didatangkan dari Kanada. Pihak Departemen Pertanian RI juga berkunjung ke Karawang dan menyatakan bahwa OPT disebabkan oleh varietas Muncul. Sebagian petani mengalami gagal panen pada musim tanam kedua. Paket bantuan dari pemerintah melalui KUT ditolak petani kecuali dalam bentuk uang. Petani juga dilanda keresahan akibat banyaknya pencurian traktor milik mereka dan aparat kepolisian lamban merespon itu.

Tahun 1999, kegagalan panen di sebagian wilayah Kabupaten Karawang makin menjadi-jadi. Petani dari 13 kecamatan mengajukan tuntutan kepada pemerintah melalui DPRD Kabupaten Karawang, antara lain, 1) perbaikan kinerja Petugas Penyuluh Lapangan atau bubarkan PPL; 2) pengelolaan dana Luran Pengguna Air (IPAir) diserahkan pada petani secara otonom; 3) tanda bukti pembayaran Pajak Bumi-Bangunan harus berupa surat sah dari bank yang ditunjuk; dan 4) penolakan terhadap Unit Usaha Otonomi (UUO). Akibat tuntutan petani pada poin 1 itu, 60 orang PPL mendemo seorang tokoh petani Karawang, Daipin, yang tinggal di Kecamatan Cilamaya, Karawang. Tokoh petani tersebut memang dikenal kritis dan berani, selain sebagai salah satu pencetus berdirinya organisasi tani IKLAS yang visi-misinya berseberangan dengan PPL, KTNA, dan HKTi. Hingga tahun 2000, petani Karawang mulai memperoleh pelatihan advokasi yang didampingi oleh staf FAO. Dinas Pertanian Karawang turut memberikan pelatihan agen hayati untuk petani. Pemerintah pusat juga mengeluarkan program ketahanan pangan dan kredit ketahanan pangan secara nasional

## Metode Penelitian

Riset sederhana ini merupakan akumulasi pengalaman empiris penulis saat menjadi fasilitator pemberdayaan petani Karawang oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dutha Tani Karawang selama tahun 2004-2005. Oleh karena itu, riset ini menggunakan metodologi observasi-partisipatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan-terlibat, wawancara, dan dialog intensif sepanjang penulis berada di lingkungan para petani di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Analisis data kepustakaan menyangkut sejarah dan isu-isu strategis dunia petani di Karawang, dilakukan dengan landasan teori modernisasi, teori pembangunan, teori masyarakat, dan sosiologi politik yang menyangkut petani.

## Hasil dan Diskusi

Luas Kabupaten Karawang ialah 1.753,27 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,37 % luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan berbagai catatan resmi pemerintah, sawah-sawah di Kabupaten Karawang berada di atas lahan kering yang dibagi menjadi lahan berpengairan teknis, setengah teknis, sederhana, dan juga tadah hujan. Penggolongan jenis lahan sawah ini tercermin dari sistem pengairan di Kabupaten Karawang sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Jenis Pengairan	Luas Th. 2001 (dalam Ha)	Prosentase	Luas Th. 2002 (dalam Ha)	Prosentase
Irigasi teknis	80.531	86,05	80.556	86,50
Irigasi semi teknis	5.006	5,35	5.107	5,48
Irigasi sederhana	4.218	4,50	4.218	4,52
Tadah hujan	3.835	4,10	3.249	3,50
<b>Jumlah</b>	<b>93.590</b>	<b>100,00</b>	<b>93.130</b>	<b>100,00</b>

Tabel 1. Karawang Dalam Angka, 2002.

Dari tabel di atas, tampak luas total lahan pertanian di Kabupaten Karawang pada tahun 2002 mulai berkurang dibanding luas total lahan tahun 2001. Penyempitan lahan pertanian ini seolah menguntungkan mengingat pengairan persawahan di kabupaten tersebut menggunakan irigasi teknis, bukan tadah hujan. Curah hujan di Kabupaten Karawang tergolong rendah, yaitu 1.453 mm atau 121 mm per bulan. Akan tetapi, pada musim tanam pada tahun 2003-2004, areal pertanian di Kabupaten Karawang mengalami kekeringan dan kebanjiran silih berganti. Pada musim tanam gadu (morekat) tahun 2003, misalnya, terdapat sekitar 22.000

hektar sawah petani Karawang yang dilanda kekeringan. Pada tanggal 7 Mei 2003, Bupati Karawang Ahmad Dadang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 521.1/1436-EK tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian. Surat Edaran tersebut memuat hasil rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam rangka menyikapi krisis kekurangan air untuk lahan persawahan di Karawang. Pemkab Karawang menggulirkan 3 program praktis, yaitu 1) Gilir giring, yakni program pendistribusian air ke petakan sawah petani secara bergilir dan dalam pelaksanaannya melibatkan petani, aparat pemerintah kecamatan dan desa, serta kepolisian dan tentara; 2) Pompanisasi, yakni program kredit atau utang untuk petani dari pemerintah dalam bentuk 1 unit pompa air senilai Rp8 juta dan utang itu harus dibayar petani secara berangsur sebanyak 8 kali atau 8 musim panen; dan 3) Singgangisasi, yakni praktek memanfaatkan tunas-tunas atau butiran-butiran padi yang tumbuh sehabis sawah dipanen. Butir padi hasil singgang ini biasanya kecil-kecil dan setelah menjadi nasi biasanya lembek. Oleh karena itu, padi singgang biasanya digunakan untuk makanan bebek dan sifatnya milik umum, walau berada di lahan milik perorangan. Ketiga program tersebut ditentang oleh para petani Karawang karena dalam pelaksanaannya justru terasa membebani atau memberatkan petani.

Pada Pebruari 2004, hampir setengah bulan sawah-sawah petani terendam air akibat banjir. Menurut catatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang, banjir itu merendam sekitar 25.246 hektar areal persawahan petani sehingga merusak semua tanaman padi yang baru ditanam. Jauh sebelum ini, pada Pebruari 2002, banjir juga pernah melanda areal pertanian di Kabupaten Karawang. Ada sekitar 1.500 hektar sawah yang terendam banjir di tiga desa di Kecamatan Tempuran dan menimpa sekitar 350 hektar sawah di satu desa di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Umur tanaman padi yang terkena banjir itu rata-rata sekitar 30 hari. Sebagian besar mata pencarian penduduk Kabupaten Karawang adalah bertani. Namun, lapisan sosial kaum petani tersebut dapat dipetakan berdasarkan status atau posisi kerjanya, yaitu sebagai petani pemilik, petani penggarap, dan buruh tani. Berdasarkan catatan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang terukur bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 1998 ialah sebesar 1.630.144 jiwa atau terdiri dari 326.029 Kepala Keluarga (KK). Diantara jumlah itu, tercatat sekitar 281.405 Kepala Keluarga (KK) yang menekuni pertanian padi. Tabel di bawah ini memperlihatkan gambaran jumlah penduduk sesuai status kepetaniannya itu.

No	Rincian	Jumlah KK
1	Petani pemilik tidak menggarap	43.362 KK
2	Petani pemilik penggarap	80.905 KK
3	Petani penggarap	47.574 KK
4	Petani buruh	118.431 KK
5	Petani tambak	1.824 KK
6	Petani buruh tambak	1.312 KK
	<b>Jumlah</b>	<b>281.405 KK</b>

**Tabel 2. Jumlah Petani Kabupaten Karawang Tahun 1998**

Berdasarkan data di atas, menurut hasil penelitian Tim PIKA Sp PSDA (Pusat Sumber Daya Air Jawa Barat, tahun 2002), hanya 25% saja petani yang memiliki pekerjaan tambahan. Selain itu, petani yang berkeinginan beralih profesi berjumlah sebesar 60%, tetapi mereka tidak segera melaksanakan niatnya itu karena belum ada lapangan kerja yang bisa dimasuki kecuali mungkin pekerjaan serabutan, seperti buruh bangunan, pertukangan, dan lain-lain. Dari penelitian ini tersimpul bukti bahwa kehidupan kaum petani selalu berada dalam garis yang serba kekurangan. Pada saat yang sama, mitos Kabupaten Karawang sebagai daerah Lumbung Padi masih ditembang-tembangkan. Pada tahun 2002, misalnya, pemerintah kabupaten mengatakan bahwa Kabupaten Karawang dapat menghasilkan 1.095,657 ton padi dari hamparan sawah petani seluas 93.130 hektar. Padahal, hasil produksi padi selama lima tahun terakhir dihitung dari tahun 2002 itu mengalami penurunan yang disebabkan oleh bencana, biaya produksi mahal, harga gabah rendah, alih fungsi lahan untuk industri dan perumahan, dan lain-lain. Tabel berikut ini menggambarkan penurunan hasil produksi padi itu:

Rincian	1998	1999	2000	2001	2002
Produksi Padi (ton)	918,924	1.108,596	1.083,596	1.111,013	1.095,657
Luas Panen (ha)	180,429	185,602	183,948	186,543	182,635
Produktivitas ton/ha	5,092	5,973	5,890	5,656	5,99

**Tabel 3. Luas Panen dan Produksi Padi di Karawang**

Dalam konteks kepemilikan lahan, petani di Kabupaten Karawang dapat pula dipetakan menjadi, sebagai berikut: 1) petani miskin dengan kepemilikan lahan di bawah 1 hektar; 2) petani sedang atau menengah dengan kepemilikan lahan antara 1 hektar hingga 5 hektar; dan 3) petani kaya dengan kepemilikan lahan di atas 5 hektar.

Petani yang berada di luar poin 1 hingga 3 dapat dikatakan sebagai petani tanpa lahan (*landless*), yaitu buruh tani, petani penggarap, petani penderep (buruh panen), dan petani pengeprik (pengumpul sisa-sisa padi di sawah yang telah dipanen). Munculnya petani pengeprik itu terkait erat dengan pergeseran teknis dalam dunia pertanian di Karawang. Pada masa lampau, sebelum padi varietas unggul ditemukan, cara panen dilakukan dengan menggunakan ani-ani (ketam). Cara ini efektif untuk menghindari kerontokan bulir-bulir padi dari tangkainya saat dipanen. Batang padi relatif tinggi. Panen dengan alat ani-ani (ketam) membutuhkan kehati-hatian agar tidak terkena jari tangan dan hal ini justru memperkecil tingkat kerusakan tangkai padi yang diketam. Saat ini, setelah padi-padi varietas unggul, seperti IR, PB, dan lain-lain ditemukan, batang padi yang tumbuh umumnya pendek-pendek dan tangkainya pun pendek serta bulir-bulirnya mudah rontok. Tentulah sulit dan lamban bila padi-padi ini dipanen dengan alat ketam. Lalu, digunakanlah sabit atau arit sebagai alat panen sehingga lebih cepat dan mudah. Akan tetapi, penggunaan sabit tidak bisa menghindari kerusakan tangkai padi sehingga bulir-bulirnya banyak rontok. Proses perontokan yang semula memanfaatkan kekokohan kaki untuk menggilas tangkai-tangkai padi sudah diganti dengan mesin perontok atau papan perontok. Semua proses perontokan nonkaki ini dilakukan di sawah, bukan di lumbung sehingga tidak bisa menghindari butiran-butiran padi yang tersisa. Butiran-butiran padi yang tersisa di sawah inilah yang dipunguti oleh petani pengeprik.

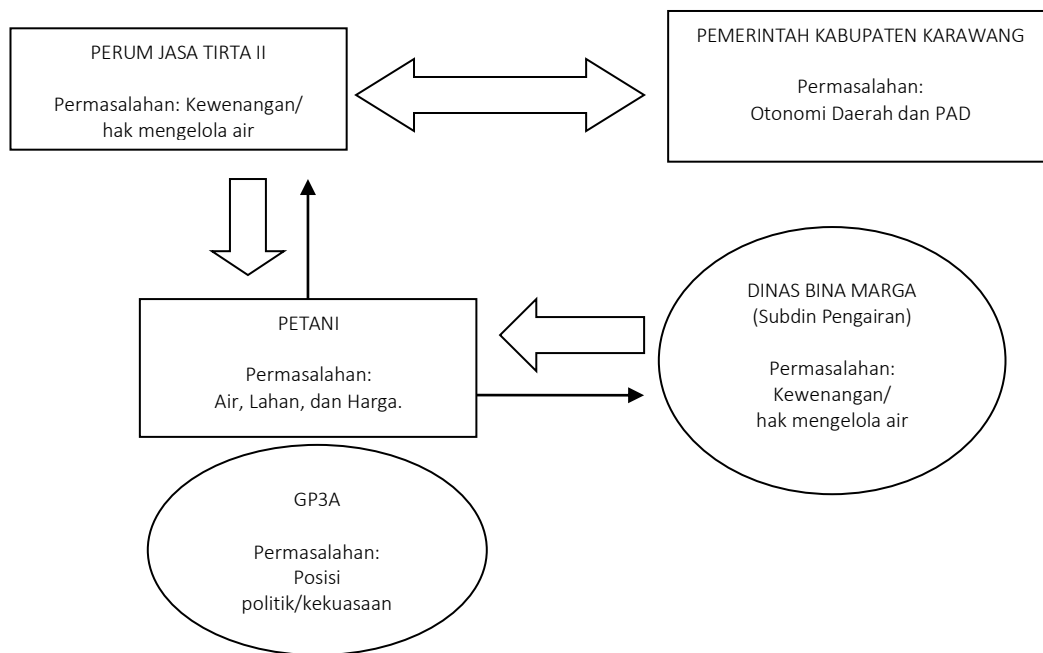
Pemetaan lapisan sosial petani berdasarkan kepemilikannya lahan di atas sesungguhnya sangat relatif. Petanya bisa berubah kapan pun sebab tergantung pada nilai ekonomis lahan pertanian yang terus bergeser sesuai perkembangan politik-ekonomi di Kabupaten Karawang dan tingkat nasional. Apalagi, menurut hasil penelitian Kurnia, akibat industrialisasi yang terus digalakkan di Kabupaten Karawang, ada indikasi terjadi perubahan orientasi petani dan masyarakat umum dalam memandang lahan pertanian. Bila pada masa dulu lahan pertanian dianggap sebagai alat produksi, maka pada masa sekarang lahan pertanian itu dianggap sebagai komoditas yang potensial untuk diperjualbelikan. Adanya perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pertanian dianggap sebagai satu-satunya penghidupan bagi petani karena belum banyak alternatif pekerjaan lain. Sisi lain, ada desakan dari sektor industri yang mampu mengubah makna tanah dari bernilai sosial (*sociological rent*) menjadi bernilai ekonomis (*economical rent*).

Perkembangan industri di Kabupaten Karawang memang memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) kabupaten ini yang semula didominasi sektor pertanian. Sejak satu dasawarsa lebih, sektor industri di Kabupaten Karawang telah menggeser posisi sektor pertanian dalam kontribusinya terhadap PDRB. Sebagai contoh, pada tahun 2001, sektor industri menyumbangkan keuntungan sebesar 31,6 persen bagi Kabupaten Karawang, sementara sektor pertanian hanya mampu memberikan keuntungan sebesar 17,6 persen saja. Meluasnya areal industri di Kabupaten Karawang terkait dengan perencanaan pemerintah yang ingin menjadikan kabupaten tersebut sebagai kawasan pengembangan industri. Pemerintah menerbitkan payung hukumnya dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 Tahun 1989. Akibatnya, daerah pertanian semakin tertekan oleh pemukiman-pemukiman atau perumahan penduduk dan pusat-pusat industri. Hal ini pulalah yang mendorong terjadinya perubahan cara masyarakat petani dalam memandang lahan pertanian yang dimilikinya. Semula lahannya dianggap sebagai alat produksi, lalu dianggap sebagai komoditas untuk diperjualbelikan. Tercatat bahwa penggunaan lahan di luar aktivitas pertanian di Kabupaten Karawang terdiri dari pemukiman 11,00%, untuk hutan 9.31%, untuk perikanan 7,2%, untuk industri mencapai sekitar 19.055,11 hektar yang terdiri dari kawasan industri seluas sekitar 5.837,5 hektar dengan 17 perusahaan, dan kawasan kota industri seluas sekitar 8.100 hektar serta kawasan zona industri seluas sekitar 5.117,6 hektar. Selain itu, terdapat lahan yang berupa tegalan atau kebun, padang rumput, tambak, perkebunan negara atau swasta, dan lahan yang belum diusahakan.

Kabupaten Karawang kian mengalami kontradiksi. Pada satu sisi, Kabupaten Karawang masih diharapkan sebagai pemasok utama padi bagi daerah Jawa Barat. Mitos Lumbung Padi masih akan terus dihidupkan, walaupun petani Karawang sudah sering mengejek julukan itu dengan memelesetkannya menjadi "Lumbung Hama dan Penyakit". Sisi lain, pada saat yang sama pemerintah menetapkan Kabupaten Karawang menjadi kawasan industri sehingga konversi lahan untuk pertanian ke nonpertanian tak dapat dielakkan. Sektor pertanian mulai dianggap kurang menjanjikan bagi kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya, walaupun anggapan itu lahir dari konstruksi pengetahuan pemerintah sendiri terhadap dunia pertanian. Kalangan masyarakat dan pemerintah masih banyak yang menganggap dunia pertanian dan petani identik dengan kemiskinan, tradisional, dan kuno. Bagi petani, fakta tentang kemiskinan dan kemelaratannya memang ada dan tidak pernah mereka ingkari, tetapi penyebabnya tidak tunggal. Fakta itu tidak semata-mata terjadi karena faktor internal yang berasal dari diri petani sendiri. Malah faktor-faktor eksternallah yang paling banyak menentukan baik atau buruknya kondisi petani dan pertaniannya. Bahkan, sejak Orde Baru, pemerintah adalah aktor tunggal dan pusat penentu kebijakan paling berkuasa atas dunia pertanian.

Tanda panah besar menunjukkan posisi tawar yang kuat, sedang tanda panah kecil menunjukkan posisi tawar yang lemah. Tanda panah besar dua arah menunjukkan posisi tawar yang seimbang dan sama kuat. Pada bagan di atas terlihat posisi tawar petani yang lemah. Di Kabupaten Karawang saat itu pemerintah telah

menggulirkan program Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang melibatkan banyak pihak. Program PKPI ini dijalankan atas dasar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1999 dan diperkuat pula oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2001. Senada dengan peraturan perundangan itu, program PKPI ini mengandung spirit pemberdayaan bagi petani. Program tersebut bermaksud mendorong para petani agar eksis dengan membentuk organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan kemudian membentuk Gabungan P3A (GP3A). P3A dan GP3A adalah istilah umum untuk organisasi pengelola irigasi dan berfungsi sebagai wadah untuk petani pemakai air di suatu daerah pelayanan irigasi. Idealnya organisasi ini dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis. Organisasi petani ini memiliki tanggung jawab dan hak untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan irigasi, sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan petani.



**Bagan 1. Konsep Penyelesaian Petani Karawang Dalam Kuasa Politik**

Sejak program PKPI ini dilaksanakan, Kabupaten Karawang saat itu dijadikan daerah contoh (pilot project) sehingga telah terbentuk 18 organisasi P3A dan 4 organisasi GP3A. Pada tahun 1990-an, P3A di Kabupaten Karawang dikenal dengan sebutan Mitra Cai. Namun, lembaga petani pemakai air itu tidak berjalan sebab pemerintah lebih cenderung mengutamakan sektor industri dibanding pertanian. Khusus di Kabupaten Karawang, terdapat banyak saluran irigasi yang mengalami kerusakan berat. Organisasi Mitra Cai tidak bisa mengatasi masalah ini. Ketiadaan dana dan infrastruktur lembaga yang lemah merupakan alasan utamanya. Akhirnya, organisasi Mitra Cai itu meredup, bubar, dan lenyap dengan sendirinya.

P3A dan GP3A yang dicanangkan pemerintah di Kabupaten Karawang saat itu tidak pula mulus dari cacat. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh LSM Dutha Tani Karawang pada pertengahan tahun 2004, tersimpul hal-hal yang menarik untuk dicermati, yakni 1) pembentukan P3A masih dilakukan oleh pemerintah dengan pendekatan proyek sehingga berbau top-down dan keberlangsungannya menjadi rentan bila proyek sudah selesai sesuai batas waktunya; 2) sumberdaya manusia dalam organisasi P3A tidak dibina secara profesional sehingga tidak paham visi, misi, dan manajemen organisasi P3A serta tidak mengerti tentang penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam makna luas; dan 3) pembentukan P3A tidak berbasis pada kepentingan masyarakat petani sebab kebanyakan pengurusnya ditunjuk langsung, bukan dipilih secara demokratis.

Selama masa Orde Baru, organisasi P3A sudah ada secara nasional di Indonesia. Akan tetapi, segala bentuk dan format kerjanya diseragamkan. Jelaslah kepentingan pemerintah Orde Baru di balik pembentukan P3A itu, yaitu dalam rangka pemantauan dan pengendalian. Organisasi ini pun dapat dijadikan mesin politik untuk memenangkan partai berkuasa dalam pemilihan umum sekaligus untuk mempertahankan kuasa-politik pemerintahan Orde Baru. Sifat pembentukan organisasi yang top down ini sesungguhnya tidak mengakar di masyarakat, tetapi dipatuhi karena ada upaya paksa atau tekanan dari aparat pemerintah. Dalam masa yang amat lama, kondisi ini akan mengubah atau membentuk petani berkarakter/bermental klien. Dalam bahasa yang populer di kalangan pejabat, intelektual, dan aktivis hal itu disebut sebagai ketergantungan absolut. Begitu pula



dalam masalah pengelolaan air dan irigasi untuk pertanian. Petani selalu mengeluh, meminta, dan menunggu sebab menganggap urusan air dan irigasi itu sepenuhnya datang dari kebaikan hati pemerintah. Padahal, secara politik maupun ekonomi, tidak ada hak-hak yang bisa sepenuhnya didapatkan secara gratis. Harus ada perjuangan dan tentu akan ada yang menjadi korbannya!

## Kesimpulan

Kesimpulannya dimaksudkan untuk mengatakan bahwa pemberdayaan yang mendesak bagi para petani di Kabupaten Karawang ialah pemberdayaan politik. Politik di sini tentulah dalam pengertian yang luas dan terkait dengan kemampuan berdemokrasi. Berunding atau berdiplomasi, penggunaan media massa untuk opini publik yang baik, lobi-lobi taktis dan strategis sesuai kepentingan kolektif, cara mengorganisasikan jaringan, menggunakan kemampuan intelektual berdasarkan pengalaman dan bacaan, atau kemampuan berorganisasi secara terdidik dan profesional, merupakan sebagian dari hal-hal yang pokok dalam pemberdayaan politik itu. Tentu argumen ini diajukan dengan alasan berdasarkan fakta empiris. Bahwa pada masa Orde Baru hingga awal reformasi masih terjadi hal-hal, seperti berikut: “Ketika petani telah memiliki kecerdasan dan keberanian untuk melawan, pada saat yang sama mereka dikalahkan oleh dua hal yang mereka tidak punyai sekaligus, yaitu kekuasaan secara politik dan modal (uang) secara ekonomi.” Argumen ini juga diajukan dalam rangka mengambil jalan berbeda dari kebanyakan pemberdayaan yang sering didasarkan pada indikator-indikator kemiskinan, baik kemiskinan absolut (dinilai berdasarkan ukuran-ukuran tertentu) maupun kemiskinan relatif (dinilai berdasarkan perbandingan kondisi satu masyarakat dengan yang lain).

Tidak ada orang yang menolak hidup sejahtera. Kesejahteraan itu adalah impian. Kesejahteraan merupakan konsep yang abstrak, tetapi berasal dari realitas yang konkret dan rasional, yaitu ekonomi. Kemiskinan juga merupakan konsep yang abstrak, tetapi sama dengan konsep kesejahteraan karena juga berasal dari realitas yang konkret dan rasional, yaitu ekonomi. Namun, gambaran tentang kemiskinan selalu dihadapkan pada gambaran tentang kesejahteraan dalam posisi yang berbanding terbalik. Bila dua konsep ini dinilai berdasarkan indikator-indikator yang serba terukur dalam bentuk jumlah dan angka, maka pasti akan ada indikator di luar itu yang terlewatkan. Atas alasan inilah, maka pemberdayaan politik di atas diajukan sebagai salah satu cara rakyat menuju kesejahteraan.

Dalam konteks petani di Kabupaten Karawang saat itu, misalnya, kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif mungkin saja wajib dientaskan, tetapi “kemiskinan” dalam politik rupanya juga mendesak di atasi. Targetnya, agar kaum petani mendapatkan hak-hak politiknya secara sah sehingga mereka tidak sekedar dapat duduk di sebuah kursi kekuasaan di tingkat desa atau kabupaten, tetapi juga berkemampuan menentukan arah-tujuan kebijakan pemerintahan sesuai kehendaknya. Paling minimal, kaum petani mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga berubah ke arah kepentingan mereka secara kolektif.

## Referensi

- Berger, Arief Budiman, 1991, *Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*, Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas.
- Abdul Arif, “Air, Pemkab, Pasar dan Petani,” dalam *Buletin SOAL Edisi 24/Th. Ke-2/Mei-Juli 2003*.
- Boby AM, “Penilaian Redaksi: Petani dan Perahu Nabi Nuh,” dalam *Buletin SOAL Edisi 5/Th. Ke-3/Maret 2004*.
- Berger, Peter L., dan Hansfried Kellner, 1981, *Sociology Reinterpreted. An Essay on Method and Vocation*, terjemahan Herry Joediono, 1985, *Sosiologi Ditafsirkan Kembali. Esei tentang Metode dan Bidang Kerja*, Jakarta: LP3ES.
- Buletin SOAL, Edisi 19/Th. Ke-2/Desember 2002*.
- Company Profile Perum Jasa Tirta II, 2000 (?)*, Purwakarta: Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Jatiluhur.
- Evers, Hans-Dieter, 1988, *Teori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fernandes, Walter, dan Rajesh Tandon (Eds.), 1993, *Riset Partisipatoris - Riset Pembebasan*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat, 1991, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_ dan Donald K. Emmerson, 1982, *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat*, Jakarta: P.T. Gramedia untuk Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo, 2002, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas: Esai-esai Budaya dan Politik*, Bandung: Penerbit Mizan, halaman 90/94.
- Kuntowijoyo, “Mentalitas Bangsa Kliken,” dalam *Kompas*, 23 Desember 2004.
- Kurnia Mansyur, 2005, *Pengelolaan Irigasi Berbasis Masyarakat. Studi tentang Pembaharuan Kebijakan*

- Pengelolaan Irigasi (PKPI) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Studi S-2 Sosiologi Konsentrasi Studi Pembangunan Pascasarjana UGM.
- Mansour Fakhri, 2001, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, Sri-Bintang, 1996, Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan, Jakarta: Yayasan Daoelat Ra'jat.
- Rachbini, Didik J., 2001, Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Scott, James C., 1993, Perlawanan Kaum Tani, terjemahan Budi Kusworo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susetiawan, 2000, Konflik Sosial, Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan, dan Negara di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan tanggal 15 Oktober 2004.
- Yustika, Ahmad Erani, 2000, Industrialisasi Pinggiran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.